Anggota DPRD Kabupaten Demak 2024-2029 Resmi Dilantik

VARIA LEGISLATIF

DEMAK (KR) - Sebanyak 50 anggota DPRD Kabupaten Demak masa bakti 2024-2029 resmi dilantik, Rabu (14/08/2024). Bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Demak, pengambilan sumpah janji dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Demak Muhamad Fauzan Hariyadi SH MH.

Hadir dalam agenda negara tersebut, Bupati Demak dr Hj Eisti'anah SE didampingi Wabup KH Ali Makhsun MSi. Di samping juga jajaran Forkompimda, kepala OPD, camat, perwakilan Kades dan Lurah. Serta tentunya keluarga dan pendukung ke-50 wakil rakyat Kabupaten Demak yang kini resmi menyandang predikat anggota legislatif.

Terpilih sebagai pimpinan sementara DPRD Kabupaten Demak hingga ditetapkannya pimpinan DPRD difinitif adalah anggota DPRD dari dua partai politik dengan perolehan kursi terbanyak pada Pemilu 2024. Mereka adalah H Zayinul Fata SE, yang tak lain adalah Ketua DPC PKB Kabupaten Demak. Serta HS Fahrudin Bisri Slamet SE, yang juga merupakan Ketua DPC PDIP Kabupaten Demak.

Usai serah terima palu kepemimpinan dari pimpinan lama kepada pimpinan sementara, Zayinul Fata sebagai Pimpinan Sementara DPRD menyampaikan, terimakasih kepada anggota DPRD periode 2019-2024 yang telah berdedikasi mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk membangun Kabupaten Demak selama lima tahun ini.

"Kepada rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Demak yang baru dilantik, selamat datang dan selamat bekerja untuk rakyat. Jangan pernah lelah memperjuangkan aspirasi rakyat," ujarnya.

KR-Sari Jati

Ketua PN Kabupaten Demak Muhamad Fauzan Hariyadi SH MH saat memimpin pengambilan sumpah janji dan pelantikan 50 orang anggota DPRD Kabupaten Demak 2024- 2029.

Disebutkan, wakil rakyat yang terpilih tak lain adalah pemimpin di daerah yang diwakilinya. Kepemimpinan, menurut Zayinul Fata, adalah sebuah karakter untuk membangkitkan keyakinan. Pemimpin mengarahkan tujuan yang dipimpinan.

Dalam demokrasi, pemimpin harus disiapkan. Termasuk saat menyongsong era Indonesia emas, pemimpin harus mampu berpikir strategis dengan mengedepankan soft skill. Sebagaimana Gus Dur, tokoh kharismatik, yang tak pernah ada tekanan dan kekerasan dalam membuat kebijakan. Sebab yang penting dalam politik adalah kemanusiaan.

Diungkapkan pula, Kabupaten Demak memiliki catatan sejarah sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa. Diawali masa pemerintahan Sultan Fatah yang didampingi Walisongo. "Dari spirit juang para leluhur itu hendaknya menjadi dasar fundamental para pemimpin Demak sekarang ini dalam berkerja," tuturnya.

Selain itu juga menciptakan inovasi yang berorientasi meningkatkan pelayanan publik. Menjadi solusi, bukan mengulang perencanaan program yang kurang berarti. "Mari bersama wujudkan stabilitas politik, sosial dan ekonomi. Demi terwujudnya Kabupaten Demak yang Bermartabat, Maju, Sejahtera," tandasnya. **ssj**

Pemprov Jateng Bagikan Paket Sembako

SALATIGA (KR)- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng memberi bantuan sosial 800 paket sembako kepada warga Salatiga, di halaman Kelurahan Kumpulrejo, Salatiga, Senin (12/8). Bantuan ini menandai HUT Provinsi Jateng yang ke-79. Penyerahan bantuan diserahkan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Jateng, Ema Rachmawati secara simbolis kepada Penjabat (Pj) Walikota, Yasip Khasani. Bantuan diteruskan kepada 10 perwakilan masyarakat. Bantuan sembako ini juga diserahkan kepada warga di 4 kecamatan yang ada di Salatiga. Bantuannya meliputi 800 paket sembako Baznas Provinsi Jawa Tengah , 200 paket di Kelurahan Kumpulrejo, 200 paket di Kecamatan Sidomukti, 150 paket Kecamatan Sidorejo, 50 paket Kelurahan Blotongan, dan 200 paket di Kecamatan Tingkir.

Sementara dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pemprov Jawa Tengah memberikan bantuan telur sebanyak 1.000 kilogram, kemudian 10 ton beras dan mie mocaf 5.000 bungkus, diperuntukan bagi 1.000 KK. Per orang 10 Kg beras dan 5 bungkus mie mocaf. Selain itu, Bank Jateng juga menyalurkan peningkatan kualitas 50 Unit Rumah Tak Layak Huni (RTLH) di Kota Salatiga senilai Rp 1 miliar dan subsidi beras 1.000 kilogram dari Korpri Jateng. **(Sus)-d**

Pompanisasi Genjot Produksi Padi

SEMARANG (KR) - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng Sumarno mengungkapkan, Kementerian Pertanian telah mengalokasikan pemasangan 4.348 unit pompanisasi di Jateng pada 2024 untuk menggenjot produktivitas padi. Dari jumlah pompa air yang dialokasikan Kementerian Pertanian, hingga kini sudah terpasang sebanyak 94,23 persen atau 4.097 unit. Pompa tersebut terpasang di 35 kabupaten dan Kota di Jateng.

Hal tersebut diungkapkan Sekda Jateng Sumarno saat memimpin rapat koordinasi optimalisasi pompanisasi dan penambahan areal tanam (PAT) di Wisma Perdamaian Semarang, Selasa (13/8). Diharapkan pemasangan pompa air tersebut bisa terealisasi 100 persen pada 17 Agustus 2024. Melalui program pompanisasi ini, Pemeprov Jawa Tengah berharap produktivitas padi di provinsi ini akan semakin meningkat. Sawah-sawah tadah hujan yang semula panen sekali setahun, bisa panen lebih dari sekali.

Sumarno mengatakan, ketahanan pangan di Jawa Tengah harus menjadi perhatian semua pihak terkait. Apalagi sesuai rancangan pembangunan jangka panjang daerah Jateng 2025-2045, Jawa Tengah ditunjuk pemerintah pusat sebagai penumpu pangan dan industri nasional. Berbagai langkah telah dilakukan Pemprov Jawa Tengah untuk merealisasikan program swasembada pangan, seperti meningkatkan ketersediaan air irigasi untuk percepatan olah tanah dan tanam, pompanisasi, serta meningkatkan PAT padi.

Dirjen Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian Andi Nur Alam Syah mengapresiasi semua komponen di Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi dan kabupaten/kota yang sudah bekerja luar biasa. Ia berharap kinerja ini bisa dilanjutkan. Berdasarkan data di Badan Pusat statistik (BPS) Jateng, sektor usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami pertumbuhan paling signifikan sepanjang kuartal I 2024. Bahkan, tumbuh melebihi sektor usaha manufaktur yang menjadi motor penggerak perekonomian di Jateng. **(Bdi)-f**

Uang Jasa Dewan Capai Rp 0,5 Miliar

WONOGIRI (KR) - Pemkab Wonogiri melalui Sekwan siap menggelontorkan uang bagi 50 anggota DPRD Wonogiri periode 2019-2024. Bagi-bagi uang jasa pengabdian untuk 50 wakil rakyat yang akan segera purna tugas itu senilai Rp 477 jutaan. Diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Wonogiri Edhy Tri Hadyantho mengatakan uang jasa pengabdian itu bakal diterima oleh seluruh anggota DPRD Wonogiri periode 2019-2024.

"Baik Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD akan mendapatkan (uang) itu. Nomenklaturnya uang jasa pengabdian, bukan sebagai pesangon," ujar Edy via ponsel di kantornya, Selasa (13/8). Diterangkan dia, nominal uang yang akan diterima bakal berbeda untuk ketua, wakil ketua dan juga anggota. Ada hitung-hitungan sesuai aturan yang menjadi dasar pemberian uang jasa pengabdian itu. "Yang jelas totalnya ada Rp 477 juta atau enam kali uang representasi. Contoh untuk anggota uang representasinya Rp 1.575," ujarnya. **(Dsh)-d**

DIINGATKAN AGAR TIDAK LUPA JANJI SAAT KAMPANYE

Anggota DPRD Kebumen, 50 Persennya Wajah Baru

KEBUMEN (KR) - Sebanyak 50 caleg terpilih resmi dilantik menjadi anggota DPRD Kebumen periode 2024-2029, Selasa (13/8). Muhammad Fauhan Fawaqi dari PKB ditunjuk menjadi ketua sementara didampingi Fritria Handini dari PDIP.

Pelantikan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dipimpim Ketua DPRD Kebumen periode 2019-2024, Sarimun. Agenda ini menjadi yang terakhir bagi Sarimun karena dalam Pemilu 2024, perolehan suaranya tidak cukup untuk kembali ke rumah rakyat.

KR-Sukmawan

Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwaningsih mengucapkan selamat kepada anggota DPRD Kebumen periode 2024-2029.

Dari 50 anggota DPRD Kebumen yang dilantik, 50 persennya wajah baru. Mereka berasal dari 9 partai politik, yakni PKB dan PDI Perjuangan masing-masing 11 kursi, disusul NasDem 8 kursi, Gerindra 7 kursi, PPP 4 kursi, Golkar dan PAN masing-masing 3 kursi, PKS 2 kursi, dan Demokrat 1 kursi. Pada periode sebelumnya (2019-2024), PDI Perjuangan menjadi yang terbanyak dengan 12 kursi. Disusul PKB 9 kursi, Gerindra 7 kursi, Golkar 6 kursi, PPP 4 kursi, NasDem 4 kursi, PAN 3 kursi, Demokrat 3 kursi, dan PKS 2 kursi.

Dari 50 anggota DPRD Kebumen periode 2024-2029 yang dilantik, Saman dari PKB memperoleh suara sah terbanyak dalam Pemilu 2024, yakni 10.218 suara. Sedangkan perolehan suara sah paling sedikit, Sigit Ragil Sapto Hadi dari PAN yang hanya memperoleh 2.321 suara.

Dalam pidato perdana sebagai ketua sementara, putra pengasuh Pondok Pesantren Al Kahfi Somalangu Kebumen itu, membuat pantun untuk rekan sejawatnya yang baru dilantik. "Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya hingga sebening kaca. Bila kemenangan sudah di genggaman, jangan lupa janji kampanyenya," ucap Gus Fauhan yang disambut tepuk tangan semua yang hadir.

Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwaningsih yang hadir juga mengingatkan anggota DPRD untuk menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi dan golongan. Selain itu, mengingatkan untuk bekerja sesuai ketentuan karena dalam bekerja diawasi penegak hukum dan lembaga pengawasan seperti KPK, BPK, dan BPKP. **(Suk)-f**

Dwi Fajar Nirwana Undur Diri dari PDIP

BOYOLALI (KR) - Kader PDIP yang juga anggota DPRD terpilih periode 2024-2029, Dwi Fajar Nirwana resmi mengundurkan diri dari PDI Perjuangan pada Rabu (14/8). Dwi datang di Kantor DPC PDIP Boyolali ditemani ratusan masa pendukungnya dengan mengendarai dua bus. Setiba di Kantor DPC PDIP Fajar langsung menyerahkan kartu tanda anggota (KTA) PDIP dan surat pengunduran diri yang diterima oleh pengurus DPC PDIP Boyolali.

Usai menyerahkan KTA, Dwi Fajar Nirwana mengatakan, dalam penguduran diri tersebut akan mendampingi bakal calon bupati (Bacabup) Agus Irawan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Boyolali 2024. "Pengunduran diri sudah kami perhitungkan, saya akan mendampingi Agus Irawan sebagai wakil bupati Boyolali dalam pilkada 2024," katanya kepada wartawan,Rabu(14/8).

Alasan maju pilkada bersama Agus Irawan, pihaknya mengaku, dengan Agus Irawan memiliki visi misi yang sama yakni untuk membangun Boyolali kedepan yang lebih baik. "Kami maju bersama Mas Agus memiliki visi misi yang sama yaitu demi membangun Boyolali ke depan yang lebih baik lagi," jelas Dwi Fajar.

KR-Mulyawan

Dwi Fajar Nirwana menyerahkan surat pengunduran diri.

Disinggung terkait kedekatan dengan partai lain, Fajar menambahkan, sampai saat ini sudah melakukan silaturahmi ke beberapa kantor partai politik (parpol). ìKami bersama Mas Agus sudah melakukan silaturahmi ke sejumlah parpol dan respon mereka juga baik dalam maju dalam pilkada 2024 ini,îtandasnya. Pengurus DPC PDIP Boyolali saat dimintai keterangan terkait pengunduran diri Dwi Fajar Nirwana belum memberikan kejelasan. **(Mul)-f**

PASCAPELANTIKAN ANGGOTA DEWAN

Wajib Ikuti Orientasi BPSDM Kemendagri

DEMAK (KR) - Sebanyak 50 Anggota DPRD Kabupaten Demak masa bakti 2024-2029 resmi dilantik, Rabu (14/8/2024). Pascapelantikan, para wakil rakyat hasil Pemilu Legislatif 14 Februari lalu itu wajib mengikuti orientasi yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri.

Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Demak H Moh Muchlis SE MSi menuturkan, dari 50 anggota DPRD yang telah diambil sumpah dan janjinya itu, sebanyak 29 orang lama dan 21 orang baru. SK Gubernur Jateng Nomor 170/100 tahun 2024, tentang peresmian pemberhentian DPRD Kabupaten Demak 2019-2024 dan pengangkatan DPRD Kabupaten Demak periode 2024-2029 diterbitkan, menindaklanjuti penyerahan LHKPN mereka yang lengkap.

KR-Istimewa

H Moh Muchlis SE MSi.

"LHKPN sudah divalidasi KPK, baik anggota dewan lama maupun baru sudah lengkap. Sehingga SK Gubernur Jateng tersebut diterbitkan, dan menjadi dasar hukum pelantikan anggota DPRD Kabupaten Demak 2024-2029," ujarnya. Sebagaimana UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, unsur penyelenggara daerah adalah kepala daerah dan DPRD. Sehingga anggota DPRD harus memiliki kompetensi. "Orientasi BPSDM Kemendagri ini dimaksudkan memberikan sertifikasi hak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bagi anggota DPRD yang baru. Diagendakan pada 26-29 September, dan ada ujian kompetensinya. Jadi misalkan ada yang tidak lulus, harus mengulang sampai lulus dan dinyatakan berkompetensi," urai Muchlis.

Sementara belum terpilih pimpinan difinitif, lanjut Muchlis, DPRD yang baru akan dipimpin pimpinan sementara. Mereka dipilih dari dua partai terbesar. Di Kabupaten Demak, dua partai politik dengan jumlah perolehan kursi terbanyak adalah PKB dengan 13 kursi dan PDIP dengan 12 kursi. "Tugas pimpinan sementara ini adalah memimpin rapat, dan menyiapkan tata tertib. Selain itu menyusun komisi, dan menfasilitasi penetapan pimpinan difinitif," pungkasnya. **(Hrd)-f**